

Diplomasi Pertahanan Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam membendung Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara

Wandi Abbas^{1,*}; Abd. Rahman Hasri², Mu'min³

^{1,2,3} Universitas Sulawesi Barat, Majene,

*Correspondence : wandi@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Setiap negara pastinya memiliki tujuan politik luar negerinya masing-masing, tak terkecuali Indonesia, negara Indonesia memiliki tujuan politik luar negeri yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 di alinea pertama dan keempat yang intinya menghendaki perdamaian dunia, peningkatan ekonomi dan juga berpartisipasi aktif dalam organisasi dunia. Salah satu tujuan utamanya adalah keamanan nasional bagi masyarakat Indonesia, tentunya Indonesia berupaya meningkatkan keamanan bagi warganya dengan cara memperkuat pertahanannya salah satu caranya adalah melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat. Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi literatur sebagai bahan data pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara serta mengetahui bagaimana Pengaruh Diplomasi Pertahanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia Dalam Membendung Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Dimana analisa dalam kasus adalah adanya dominasi diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Indonesia tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap Hegemoni Tiongkok dikawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan Diplomasi pertahanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap Hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Kemitraan strategis yang erat, peningkatan kerjasama pertahanan, dan pembentukan aliansi regional membantu Amerika Serikat dan Indonesia memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang dapat berasal dari Tiongkok. Selain hubungan diplomasi antara negara kawasan Asia Tenggara juga peningkatan alokasi anggaran militer membantu negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama pertahanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok.

Kata kunci

Amerika Serikat, Diplomasi Pertahanan, Hegemoni, Indonesia, Tiongkok

ABSTRACT

Each country certainly has its own foreign policy objectives, including Indonesia, the Indonesian state has foreign policy goals listed in the Preamble of the 1945 Constitution in the first and fourth paragraphs which essentially want world peace, economic improvement, and active participation in world organizations. One of its main goals is national security for the people of Indonesia, of course, Indonesia seeks to improve security for its citizens by strengthening its defense, one way is to conduct diplomacy with the United States. Writing this research using a descriptive method using

secondary data, where data collection using literature studies as supporting data material. This research aims to find out what are the forms of Chinese hegemony in Southeast Asia and to find out how the influence of US Defense Diplomacy on Indonesia in stemming Chinese hegemony in Southeast Asia. The analysis in the case is that the dominance of diplomacy carried out by the United States and Indonesia will certainly have a significant effect on Chinese hegemony in the Southeast Asian region. The results of this study indicate that the United States' defense diplomacy towards Indonesia has a major influence on Chinese hegemony in Southeast Asia. Close strategic partnerships, increased defense cooperation, and the formation of regional alliances are helping the United States and Indonesia strengthen their positions in the face of threats that could come from China. In addition to diplomatic relations between countries in the Southeast Asian region, an increase in military budget allocations will help countries in Southeast Asia strengthen their defense cooperation and strengthen their position in the face of threats originating from China.

Keywords

China, Defense Diplomacy, Hegemony, Indonesia, United States

Pendahuluan

Masyarakat Internasional saat ini menyadari bahwa praktik diplomasi sangat penting dalam Hubungan Internasional. Hal ini karena diplomasi merupakan suatu hal yang penting untuk merumuskan kebijakan luar negeri sebuah negara yang efektif terhadap negara lain. Selain itu diplomasi juga di butuhkan sebagai metodologi dan mekanisme dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang lebih. Diplomasi merupakan sebuah bentuk interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dari dua negara atau lebih. Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah melindungi negara, menciptakan kesejahteraan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia sesuai dengan amanat kemerdekaan sebagai landasan utama dalam memperjuangkan kepentingan nasional (Sukadis; 207).

Dalam perspektif realisme menurut teori ilmu Hubungan Internasional, negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis. Tujuan utama kepentingan nasional suatu negara memiliki tujuan utama yaitu untuk mempertahankan eksistensi dan keamanan serta menggunakan instrumen militer diplomasinya untuk melindungi negara lain (Weldes; 1999). Untuk mencegah ancaman militer dan non militer, Indonesia menggunakan diplomasi sebagai strategi pertahanan defensif aktif dan salah satunya adalah melalui diplomasi. Diplomasi merupakan sebuah langkah utama bagi sebuah negara dalam menjaga pertahanan negaranya yaitu kedaulatan wilayah maupun warga Negara (Anwar: 2014). Indonesia sendiri telah melakukan diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk menjaga integritas nasional, stabilitas regional dan perdamaian dunia (Anwar; 2014).

Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin meningkat dan semakin intens pada saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY tercatat mengunjungi Amerika Serikat sebanyak empat kali, masing-masing sebanyak dua kali pada tiap periode kepemimpinan beliau. Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan bahwa Indonesia berperan

penting bagi Amerika Serikat. *Pertama*, Indonesia merupakan salah satu aktor keamanan bagi kawasan Asia Tenggara dimana Amerika Serikat sendiri sangat bergantung serta memiliki kepentingan ekonomi, perdagangan dan keamanan di Indonesia. *Kedua*, meskipun Indonesia kerap kali mengalami krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berada di Indonesia tetap memperoleh keuntungan yang bersumber dari sumber daya alam Indonesia, seperti emas, tembaga, minyak, gas, dan lain-lain. Hal ini memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis bagi Amerika Serikat khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, sehingga kepentingan nasional Amerika Serikat dipengaruhi oleh keamanan dan kemakmuran Indonesia.

Diplomasi Pertahanan merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat kekuatan di berbagai kegiatan yang sering dilakukan oleh kementerian pertahanan untuk mengusir musuh, serta membangun kepercayaan dalam pembangunan demokrasi. Evan Laksmana adalah seorang pengamat militer yang mengatakan bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat agar mengambil peran penting dalam hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut. bahwasanya pada level tertentu kerjasama antar kedua negara tersebut sangat baik untuk dilakukan sebagai upaya untuk membangun kerjasama personal serta mempererat kerjasama militer di masa yang akan datang. Diplomasi yang dilakukan Indonesia merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam memperkuat pertahanan negara sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI serta berbagai kebijakan pertahanan selama pemerintahan SBY. Dalam hal memperkuat pertahanan negara Indonesia tentunya sangat bergantung terhadap alutsista asing terkhususnya Amerika Serikat, sehingga kerjasama pertahanan merupakan salah satu kunci dalam hal memperkuat pertahanan tersebut.

Indonesia telah mengadopsi kebijakan diplomasi pertahanan yang aktif sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pertahanan nasional dan mencapai tujuan strategis dalam konteks keamanan regional dan global. Terdapat 4 alasan mengapa Indonesia intens menerima diplomasi pertahanan yakni, yang *pertama* Mengembangkan hubungan bilateral dan multilateral. Diplomasi pertahanan dapat membantu Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara asing dan membangun kerja sama militer dan pertahanan. Hal ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia di dalam dan luar negeri. *Kedua* Meningkatkan kemampuan pertahanan, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya melalui kerja sama dalam bidang pelatihan militer, peralatan pertahanan, dan teknologi pertahanan.

Dengan memperkuat kemampuan pertahanannya, Indonesia dapat melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya. *Ketiga* Memperkuat stabilitas regional, dapat memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan menjaga perdamaian dan stabilitas di tingkat regional. Dalam hal ini, diplomasi pertahanan dapat membantu mencegah konflik dan mengurangi ketegangan di kawasan. Dan yang *keempat* untuk mendorong perdagangan dan investasi yang dapat membantu mendorong perdagangan dan investasi antar negara, karena kerja sama di bidang pertahanan dapat membuka peluang kerja sama di sektor lainnya. Dengan demikian, adopsi kebijakan diplomasi

pertahanan aktif dapat membantu Indonesia memperkuat posisi strategisnya dalam konteks keamanan regional dan global serta memperkuat kemampuan pertahanannya (Baryadi; 209).

Metode

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian eksplanatif, dibuat untuk menyesuaikan historis secara sistematis dengan cara mengumpulkan data yang aktual. Metode eksplanatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala itu terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literature yang bersifat sekunder dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Aktivitas Militer Tiongkok di Asia Tenggara

Diplomasi sederhananya dipahami sebagai bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia menciptakan suatu konsep baru yang dikenal dengan istilah diplomasi total (Tryoge & Segeng; 2014). Pada konsep diplomasi total, *semua stake holder* (pemangku kewenangan) diplomasi di Indonesia diarahkan untuk berperan (selektif) aktif sebab pada dasarnya diplomasi menjadi tanggung jawab seluruh komponen utama, komponen pendukung serta komponen cadangan yang didukung dengan unsur lain sebagai nilai kekuatan bangsa. Dengan peran serta seluruh komponen negara, diplomasi bangsa akan semakin kuat dan peluang memperjuangkan kepentingan nasional menjadi semakin melambung.

Diplomasi pertahanan memiliki ketetapan untuk dijalankan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Misalnya, hal yang menonjol dan masih dijalankan oleh bagian dari TNI/komponen utama (pertahanan militer). Pada kondisi ini, dapat pula didefinisikan sebagai diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri atau melaksanakan kebijakan dan keputusan politik negara/kebijakan pertahanan serta mendukung menyelesaikan berbagai permasalahan Internasional (Juglak TNI; 2017). Sehubungan dengan hal tersebut, Martin Griffiths dan Terry Callaghan menyatakan bahwa diplomasi merupakan proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan hubungan internasional. Keikutsertaan TNI merupakan bagian dari diplomasi total yang dinilai sangat strategis dalam rangka mencapai tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara geografis, dinamika perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan (LCS) akibat klaim yang tidak jelas ketetapannya. Hal ini menjadi isu keamanan utama di kawasan ASEAN. LCS memiliki luas wilayah sekitar 3 juta km² dan terletak di antara pantai selatan Tiongkok dan Taiwan di sebelah Utara, pantai negara-negara Asia Tenggara di sebelah Barat, gugusan pulau di Filipina di sebelah Timur, serta Kalimantan dan Indonesia di sebelah Selatan. Adapun negara yang berbatsan dengan LCS adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Tiongkok, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan,

Thailand, dan Vietnam (Clive Schofield; 2016). Sementara itu, daerah yang menjadi bagian penting pada sengketa ini adalah kawasan laut dan daratan di gugusan kepulauan Paracel dan Spratly (Indonesia.go.id; 2020).

Sampai dengan saat ini LCS masih belum menemui titik temu sejak dimaulai pada tahun 1970-an. Sejumlah negara yang terlibat dalam sengketa LCS, sebagai *claimant states*, yaitu Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Negara-negara ini mengklaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing. Tiongkok menggunakan dasar historis, sedangkan *claimant states* lainnya menggunakan dasar geografis yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).



Gambar 1. Peta Laut Cina Selatan

Sumber: *Center for Strategic and International Studies, Permanent Court of Arbitration, 2012.*

Nilai strategis terletak pada *Sea Lines of Trade (SLOT)* dan *Sea Lines of Communication (SLOC)* yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga membawa jalur LCS sebagai jalur tersibuk di dunia, setengah lalu lintas perdagangan dunia tercatat melewati jalur tersebut. LCS juga memegang nilai ekonomis dengan adanya ketersediaan sumber daya alam berupa cadangan minyak dan gas alam (Utomo; 2018).

Nilai strategis inilah yang kemudian membuat setiap *claimstates* berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional. Tindakan yang dilakukan pun bervariasi, berupa manuver, mulai dari peluncuran peta *mini dash line* oleh Tiongkok, pengajuan gugatan Filipina Terhadap Tiongkok kepada pengadilan Arbitrase Permanen PBB, hingga kepada tindakan asertif seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan menempatkan militer di LCS.

Kompleksitas dan intensitas LCS bahkan telah membuat *great power* seperti Amerika Serikat turut “hadir” melalui kekuatan militernya dengan meningkatkan frekuensi aktivitas *Freedom of Navigation Operation (FONOPS)* untuk menentang ekspansi

Tiongkok di kawasan tersebut (Danang; 2019). Tiongkok sebagai *major power* berusaha meningkatkan pengaruhnya di LCS melalui klaim *nine dash line* dan *traditional fishing zone*. Klaim ini merupakan geostrategi Tiongkok untuk mengamankan sumber daya, jalur perdagangan, dan distribusi energinya.

Klaim Tiongkok ditolak oleh Amerika Serikat sebab Amerika Serikat beralasan bahwa klaim tersebut ilegal dan tidak berdasar. Tindakan lebih lanjut oleh Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael R. Pompeo menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mencegah Tiongkok menjadikan LCS sebagai imperium maritimnya (Saul; 2009). Perhatian Amerika Serikat tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya untuk menegakkan hegemoni maritim mereka. LCS merupakan wilayah strategis yang harus bebas dilalui oleh semua negara dalam kegiatan perekonomian dan lainnya.

Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan manuver- manuver politik dan militer sebagai bagian dari kebijakan *balance of power* untuk memberikan pengaruhnya di kawasan LCS. Adapun kebijakan Tiongkok di LCS antara lain membangun *Militarized Artificial Features Dispratly* dan merebut *Scarborough Shoal*, membangun pulau buatan serta infrastruktur dan menempatkan penduduk Tiongkok disana dengan pusat perwakilan di Sansha City yang berada di Woody Island, melakukan latihan militer di LCS, dan mengusir kapal dari negara lain yang melakukan eksplorasi di wilayah yang diklaim. Dilain sisi, kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait LCS antara lain pertama, menegaskan bahwa Amerika Serikat berpedoman pada keputusan Arbitral Tribunal.

Diplomasi Pertahanan Amerika Serikat Terhadap Indonesia Membendung Hegemoni Tiongkok

Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan pertahanan yang kuat, yang membantu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang tersedia, beberapa poin penting yang menunjukkan pengaruh diplomasi pertahanan Amerika Serikat bagi Indonesia terhadap hegemoni Tiongkok adalah sebagai berikut: Peningkatan kerjasama pertahanan: Pada tahun 2021, Amerika Serikat dan Indonesia meningkatkan kerjasama pertahanan mereka, termasuk peningkatan latihan bersama dan pertukaran informasi, yang membantu memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman yang dapat berasal dari Tiongkok. Kemitraan strategis: Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kemitraan strategis yang erat, yang membantu mereka untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi hegemoni Tiongkok. Pada tahun 2021, kedua negara menandatangani berbagai perjanjian yang memperkuat kemitraan strategis mereka dan membantu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok. Pembentukan aliansi regional yakni Amerika Serikat dan Indonesia juga berkoordinasi dengan negara-negara lain di kawasan untuk membentuk aliansi regional yang kuat, yang membantu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi hegemoni Tiongkok. Pada tahun 2021, Amerika Serikat dan Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkuat aliansi regional

dan memastikan bahwa Tiongkok tidak memiliki kelebihan dalam hal kekuatan pertahanan.

Peningkatan kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan poin penting dalam menghadapi hegemoni Tiongkok di Asia. Beberapa data yang menunjukkan peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara adalah sebagai berikut: Latihan bersama: Pada tahun 2021, Amerika Serikat dan Indonesia melakukan beberapa latihan bersama, termasuk *Joint Defense Working Group Meeting*, *Joint Military Training Exercises*, dan *Joint Counter-Terrorism Exercises*. Latihan bersama ini membantu meningkatkan kemampuan militer kedua negara dalam menghadapi ancaman yang dapat berasal dari Tiongkok. Amerika Serikat melakukan pertukaran informasi dengan Indonesia agar membantu memperkuat kerjasama pertahanan antara kedua negara dan membantu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok.

Kegiatan *joint patrols*: Kedua negara juga melakukan kegiatan *joint patrols* bersama, yang membantu memperkuat kerjasama pertahanan dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok. *Joint patrols* ini juga membantu meningkatkan keamanan di kawasan dan memastikan bahwa Tiongkok tidak memiliki kelebihan dalam hal pertahanan. Peningkatan alokasi anggaran militer Amerika Serikat dan Indonesia juga meningkatkan alokasi anggaran militer mereka, termasuk peningkatan pembelian peralatan militer dan peningkatan latihan bagi pasukan militer. Hal ini membantu memperkuat kemampuan militer kedua negara dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok. Dengan data-data ini, dapat dilihat bahwa peningkatan kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap hegemoni Tiongkok di Asia.

Latihan bersama, pertukaran informasi, kegiatan *joint patrols*, dan peningkatan alokasi anggaran militer membantu kedua negara memperkuat kerjasama pertahanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan pertahanan yang kuat, yang membantu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi hegemoni Tiongkok di Asia. Berdasarkan data yang tersedia, beberapa poin penting yang menunjukkan pengaruh diplomasi pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia terhadap hegemoni Tiongkok adalah sebagai berikut: Peningkatan kerjasama pertahanan: Pada tahun 2021, Amerika Serikat dan Indonesia meningkatkan kerjasama pertahanan termasuk peningkatan latihan bersama dan pertukaran informasi, yang membantu memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman yang dapat berasal dari Tiongkok. Kemitraan strategis Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kemitraan strategis yang erat, yang membantu mereka untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi hegemoni Tiongkok.

Pada tahun 2021, kedua negara memperkuat kemitraan strategis mereka dan membantu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok. Pembentukan aliansi regional: Amerika Serikat dan Indonesia juga berkoordinasi dengan negara-negara lain di kawasan untuk membentuk aliansi regional

yang kuat, yang membantu memperkuat posisi mereka dalam menghadapi hegemoni Tiongkok. Pada tahun 2021, Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat aliansi regional dan memastikan bahwa Tiongkok tidak memiliki kelebihan dalam hal kekuatan pertahanan.

Secara keseluruhan, diplomasi pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap hegemoni Tiongkok di Asia. Kemitraan strategis yang erat, peningkatan kerjasama pertahanan, dan pembentukan aliansi regional membantu Amerika Serikat dan Indonesia memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang dapat berasal dari Tiongkok. Dengan data-data ini, dapat dilihat bahwa peningkatan kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap hegemoni Tiongkok di Asia. Latihan bersama, pertukaran informasi, kegiatan *joint patrols*, dan peningkatan alokasi anggaran militer membantu kedua negara memperkuat kerjasama pertahanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok.

Latihan bersama, termasuk Indonesia, Filipina, dan Thailand, sering melakukan latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan militer dan kerjasama pertahanan. Latihan-latihan ini melibatkan pasukan militer dari kedua negara dan fokus pada berbagai hal, seperti peningkatan kemampuan taktis, logistik, dan komunikasi. Latihan bersama ini membantu negara-negara di Asia Tenggara memperkuat keamanan mereka dan memberikan rasa aman bagi warga setempat.

Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Tenggara juga saling berbagi informasi tentang ancaman keamanan, termasuk ancaman yang berasal dari Tiongkok. Pertukaran informasi ini membantu negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama pertahanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok. Kegiatan *joint patrols*, Amerika Serikat dan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia, sering melakukan kegiatan *joint patrols* bersama untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan memastikan keamanan di hal pertahanan.

Peningkatan alokasi anggaran militer Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Tenggara juga meningkatkan alokasi anggaran militer mereka, termasuk pembelian peralatan militer dan latihan bagi pasukan militer. Hal ini membantu negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kemampuan militer mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok. Dengan data-data ini, dapat dilihat bahwa peningkatan diplomatik dan pertahanan Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Latihan bersama, pertukaran informasi, kegiatan *joint patrols*, dan peningkatan alokasi anggaran militer membantu negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama pertahanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok,

Kesimpulan

Dinamika perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan (LCS) akibat klaim yang saling tumpang tindih masih menjadi isu keamanan utama di kawasan ASEAN.

Tiongkok sebagai *major power* berusaha meningkatkan pengaruhnya di LCS melalui klaim *nine dash line* dan *traditional fishing zone*. Klaim ini merupakan geostrategi Tiongkok untuk mengamankan sumber daya, jalur perdagangan, dan distribusi energinya. Sedangkan AS dengan tegas menolak klaim Tiongkok dengan alasan klaim tersebut ilegal dan tidak berdasar.

Secara keseluruhan, diplomasi pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap hegemoni Tiongkok di Asia. Kemitraan strategis yang erat, peningkatan kerjasama pertahanan, dan pembentukan aliansi regional membantu AS dan Indonesia memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang dapat berasal dari Tiongkok. Selain hubungan diplomasi antara negara kawasan Asia tenggara juga peningkatan alokasi anggaran militer membantu negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama pertahanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Tiongkok.

Referensi

- Anwar, S., (2014), *Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tentangan di Bidang Pertahanan*, Jurnal Pertahanan, Vol.4, No.2, hlm.71-93
- Baryadi, A. (2019). Indonesia's Defense Diplomacy in the Era of Globalization: An Overview of the Concept and Implementation. *Journal of ASEAN Studies*, 7(1), 1-20.
- Clive Schofield, "Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea," in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions* (Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2016).
- Indonesia.go.id (2020 1/15) "Sengketa di kawasan laut natuna Utara," diakses pada <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>
- Juklak TNI No.54/II/2006 tentang Diplomasi Militer; Perhatian Keppang TNI : KEP/2/1/2007 tentang Doktrin TNI Tridek;
- Muhammad Danang Prawira Utama, (2019, 12) "Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS)," *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 4, No. 2. hlm 329- 346.
- Pohan, R., (2001), *Menjaga Jembatan Jakarta-Washington: Dubes Dorodjatun Kuntjoro-Jakti 1998-2001*, Washington DC, hlm.90
- Saul Bernard Cohen, (2009), *Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Editions*, Rowman & Littlefield
- Sukadis, B., (2017), *Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat*, Mandala, Vol. 1, No.1, hlm.92-123
- Tryoge Budi P. & Segeng Brantas (2014). Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI. *Jurnal Pertahanan* .
- Utomo, Prihantoro & Adriana, (2017), "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik laut Cina Selatan, *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, 63-88.

Weldes, J., (1999), *Construction of National Interest: The United States and The Cuban Missil Crisis*, Minnesota, Vol.12, hlm. 1-316